

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).
- Dewi, IGA Gangga Santi. *Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996).
- , *PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya*, (Jakarta: Majalah Renvoi, 2007)
- , *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Ismaya, Samun, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Limbong, Bernard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2011)
- , *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: MP Pustaka Margaretha, 2011)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988)
- Narsudin, Udin, *Persoalan Substansi Notaris & PPAT Dalam Praktek*, (Jakarta: CV KUMbro, 2018)
- Ranoemiharja, Atang, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek Dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria Indonesia*, (Bandung: Parsito, 1982)
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016)
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- , *Hukum Agraria*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Soerodjo, Irawan, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, (Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2014)

Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

2. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

3. Sumber Jurnal

Borman, M. Syahrul, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 3 No. 1, (Universitas Doktor Soetomo, Februari 2019)

Murni, Christina Sri, *Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat*, (Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Juni 2018),

Santoso, Urip, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta*, (Universitas Airlangga: Perspektif, 2010)

Suganda, Ni Ketut Vivin, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Universitas Mataram: Jatiswara, 2017)

Sari, Indah, *Hak-hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)*, (Jurnal Universitas Suryadarma: 2020)

4. Sumber Wawancara

Dewi, Lispeni Kurnia, *Wawancara*, Notaris/PPAT Kabupaten Kendal, (Kendal: 21 Desember 2021)

Iwan, Dwi *Wawancara*, Pengurus PT Hamparan Karunia Alam Semesta, (Kendal, 6 Desember 2021)

Latif, Ansori, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, (Kendal: 14 Desember 2021)

Purwanto, Setyo, *Wawancara*, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, (Kendal, 14 Desember 2021)